

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Rusia pasca Invasi Rusia-Ukraina tahun 2022 telah mengalami pergeseran yang signifikan di tiga bidang yaitu politik, keamanan, dan ekonomi. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Rusia di bidang politik adalah Indonesia menjadi *peacemaker* antara Rusia dan Ukraina. Hal ini tercermin melalui kunjungan Presiden Jokowi ke Kremlin untuk bertemu dengan Presiden Rusia, pada 30 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut Indonesia membawa pesan dari Ukraina dan Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya agar dialog damai antara kedua negara terus dibuka. Kemudian Indonesia melanjutkan misi perdamaian melalui pertemuan antara BKSAP DPR RI bersama IPU Task Force pada 13–14 Juli 2022. Pertemuan tersebut sebagai bentuk kontribusi aktif dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan antara Rusia-Ukraina dan ditegaskan pula bahwa dialog dan diplomasi merupakan kunci penyelesaian setiap konflik. Selanjutnya bentuk perwujudan Indonesia dalam menjadi *peacemaker* antara Rusia dan Ukraina yaitu melalui peran keketuaan Indonesia di KTT G20. Dalam KTT G20 yang menghasilkan 3 komunikasi dan kesepakatan penyebutan istilah kompromis "perang di Ukraina" alih-alih "perang Rusia di Ukraina".

Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Rusia di bidang keamanan ditunjukkan melalui Indonesia yang melobi Rusia agar terus membuka ruang diskusi perdamaian dengan Ukraina dan Indonesia melobi agar ekspor pangan dan pupuk Rusia dibuka kembali. Hal ini menunjukkan respons aktif terhadap dampak global akibat konflik Rusia-Ukraina dengan menjalankan kebijakan luar negeri di bidang keamanan yang menekankan perdamaian, isu kemanusiaan, dan keamanan pangan. Tindakan yang diambil oleh Indonesia untuk melakukan kebijakan luar negerinya tersebut adalah pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke Moskow pada 30 Juni 2022, Presiden Jokowi menekankan pada poin perdamaian dan keamanan pangan dan pupuk sebanyak dua kali. Meskipun belum menghasilkan gencatan senjata, langkah tersebut dinilai sebagai bentuk diplomasi non-militer Indonesia. Selain itu, kerja sama Indonesia-Rusia juga mencakup sektor strategis seperti

energi atom melalui Rosatom State Corporation dan penguatan pertahanan nasional. Tindak lanjut dari pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan Presiden Putin dilakukan pada 30 Juni 2022 adalah adanya usulan zona demiliterisasi oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam forum Shangri-La Dialogue 2023, yang mendapat sambutan berbeda dari Rusia dan Ukraina. Hal ini menunjukkan upaya berkelanjutan Indonesia dalam mendorong penyelesaian damai serta memperluas kerjasama strategis di bidang keamanan.

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Rusia di bidang ekonomi yaitu dengan Indonesia melobi agar sektor pangan dan pupuk dapat dibuka kembali. Hal ini secara aktif dan strategis, terlihat melalui rangkaian pertemuan antara Indonesia dan Rusia pasca invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Kunjungan Presiden Jokowi ke Moskow pada 30 Juni 2022 menjadi titik awal dari berbagai bentuk kerja sama bilateral yang erat melalui kesepakatan penyediaan pasokan pangan dan pupuk, serta investasi. Indonesia melobi Rusia untuk menjamin kelancaran ekspor pangan dan pupuk demi menjaga ketahanan pangan global, yang ditindaklanjuti melalui kerja sama konkret seperti penandatanganan MoU antara PT Pupuk Indonesia dengan perusahaan pupuk Rusia yaitu Uralkali dan EuroChem. Selain itu, Rusia juga menunjukkan ketertarikan dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya dalam penerapan konsep smart city dan safe city. Kedua negara juga membuka peluang peningkatan status hubungan menjadi kemitraan strategis serta menjajaki perundingan perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU). Dalam bidang energi, Rusia menawarkan kerja sama pembangunan reaktor kecil melalui Rosatom, serta mendukung sektor pariwisata, logistik, dan pertukaran antarwilayah, termasuk produk halal dari wilayah mayoritas Muslim Rusia. Seluruh bentuk kerja sama tersebut mencerminkan hubungan yang saling menguntungkan dan menggambarkan peran aktif Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus perdamaian global.

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Rusia pasca invasi Rusia-Ukraina tahun 2022 dijalankan secara aktif dan komprehensif di tiga bidang utama: politik, keamanan, dan ekonomi. Di bidang politik, Indonesia tampil sebagai peacemaker dengan memediasi dialog antara Rusia dan Ukraina serta

menyuarakan pentingnya perdamaian melalui berbagai forum internasional seperti pertemuan antara parlemen Indonesia dengan Rusia serta mediasi melalui KTT G20. Di bidang keamanan, Indonesia melobi Rusia untuk selalu membuka ruang diskusi damai dengan Ukraina, yang mana hal ini menekankan diplomasi non-militer dengan fokus pada isu kemanusiaan dan keamanan pangan, serta menjalin kerja sama strategis dalam sektor pertahanan melalui pengembangan teknologi energi nuklir bersama Rosatom. Sementara itu, di bidang ekonomi, Indonesia melobi Rusia untuk membuka ekspor pangan dan pupuk dari Rusia serta Indonesia mendorong kerja sama konkret dalam sektor pangan, pupuk, investasi, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia. Keseluruhan pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas global, memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan, serta melindungi kepentingan nasional melalui diplomasi yang konstruktif.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia, disarankan untuk terus mengembangkan diplomasi multilateral yang aktif dan fleksibel, terutama dalam menghadapi krisis internasional yang kompleks, guna menjaga kepentingan nasional tanpa kehilangan legitimasi moral di panggung global.
2. Bagi akademisi dan peneliti, penting untuk memperkuat kajian kebijakan luar negeri Indonesia dalam situasi konflik internasional agar tersedia lebih banyak landasan ilmiah dalam mendukung perumusan kebijakan yang adaptif dan berbasis prinsip.
3. Bagi pembuat kebijakan pertahanan dan ekonomi, disarankan agar memiliki strategi diversifikasi kerja sama internasional sehingga ketergantungan pada satu atau dua negara dalam sektor vital (seperti pangan dan militer) dapat diminimalkan dalam jangka panjang.